



KAJIAN ASPEK EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH PERKOTAAN SURAKARTA

Oleh :

Ratika Tulus Wahyuhana¹, Adnan Affan Akbar Botanri²

¹ Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Teknologi Yogyakarta,
ratika.wahyuhana@staff.uty.ac.id

² Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Teknologi Yogyakarta,
adnan.botanri@staff.uty.ac.id

ABSTRAK

Abstrak : Ukuran keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. Kondisi tersebut terjadi di wilayah Perkotaan Surakarta dengan pertumbuhan ekonominya cukup pesat dan perkembangannya yang telah melampaui batasan administratif. Dengan demikian, yang menjadi *Research Question* adalah: "Bagaimana perkembangan ekonomi dan tingkat ketimpangan wilayah perkotaan Surakarta?" Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil kajian penelitian menunjukkan aktivitas ekonomi didominasi oleh sektor industri, perdagangan dan jasa. Konversi lahan pertanian menjadi terbangun juga meningkat. Ketimpangan ekonomi tergolong tinggi yaitu 0,68 yang dipengaruhi persebaran penduduk dan kegiatan ekonomi yang belum merata, sehingga belum terintegrasi secara optimal antara daerah pusat dan sub-pusat. Dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangan kegiatan ekonomi wilayah Perkotaan Surakarta memiliki klasifikasi ketimpangan cukup tinggi. Perlu adanya integrasi aktivitas ekonomi yang seimbang dengan menitikberatkan pada peningkatan keterkaitan dan distribusi aktivitas ekonomi agar lebih merata yang disesuaikan dengan potensi lokal di daerah sub pusat sehingga perannya lebih optimal. Selain itu, diperlukan penguatan dalam implementasi mekanisme kerjasama sesuai dengan kebijakan dan landasan hukum kerjasama antar daerah dalam aspek ekonomi.

Kata Kunci: ekonomi, ketimpangan, perkotaan

ABSTRACT

Abstract: The measure of development success can be seen from the economic growth and the smaller the inter-income relation among the population, between regions and between sectors. In economic performance is not always equitably distributed. These conditions occur in the urban areas of Surakarta with rapid economic growth and its development has been missed. Thus, the *Research Question* is: "How is the Economic Development and Satellite Inequality Level of Surakarta Region?" This research uses quantitative approach and quantitative descriptive analysis method.

The results of research studies show that economic activity is dominated by industry, trade and services sectors. Conversion of agricultural land to be built also increased. Economic inequality is high, namely 0.68 related to the spread of population and economic activity that has not been evenly distributed, so it has not been integrated optimally between the central and sub-centers.

Can be concluded in the development of economic activities of urban areas of Surakarta have inequality high enough. It needs to be linked by focusing on increasing linkages and division of economic activities to be more evenly adjusted to local potentials in sub-central areas so that its role is more optimal. In addition, strengthening is required in the form of cooperation mechanism in accordance with the policy and legal basis of cooperation among regions in the economic aspects.

Keywords: economy, disparity, urban areas

I. PENDAHULUAN

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar dan pusat pertumbuhan di Jawa Tengah dengan aktivitas utama perdagangan dan jasa. Pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Sebagai pusat wilayah perkotaan, Kota Surakarta memiliki jumlah penduduk secara administratif sekitar 510.077 jiwa di tahun 2014. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah sekitar 4.404 Ha (relatif kecil), perkembangan Kota Surakarta cukup pesat dengan kepadatan penduduk tertinggi di wilayah Jawa Tengah. Dari penggunaan lahan yang ada, 57% lahan digunakan untuk permukiman dengan ketersediaan ruang terbuka hijau hanya sebesar 9%.

Keterbatasan lahan tidak mendukung perkembangan kota yang terus meningkat sehingga terjadi perkembangan yang melampaui batasan administratif ke wilayah sekitar seperti Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali yang mengindikasikan adanya pemekaran wilayah Surakarta ke daerah sekitarnya. Perkembangan kota yang terus meluas ini akhirnya membentuk "Perkotaan Surakarta" dimana didalamnya terdapat pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu pertumbuhan Kawasan Kartasura, Palur, atau Solo Baru. Kutub pertumbuhan/pusat pertumbuhan regional sebagai sekelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut keseluruh daerah pengaruhnya (Dawkins, 2003:140). Selanjutnya, Ertur dan Julie (2003) menjelaskan bahwa dengan adanya interaksi spasial antar daerah dan kedekatan posisi geografis merupakan aspek penting dalam perhitungan kinerja ekonomi daerah.

Perkembangan yang cukup signifikan tersebut tidak menutup kemungkinan menjadi faktor pendorong Perkotaan Surakarta terbentuk menjadi kota metropolitan. Proses pengkotaan yang terjadi di sekitar wilayah Perkotaan Surakarta terjadi secara terus menerus juga ditandai dengan terjadi peningkatan lahan terbangun sebesar 741,5 Ha sejak tahun 2003 hingga 2011. (BPS, 2013). Penambahan lahan terbangun kini sudah menyebar mengarah ke barat (Kecamatan Kartasura), selatan (Kecamatan Grogol) dan timur (Kecamatan Jaten).

Kecenderungan kondisi saat ini adalah masih terpusatnya semua pelayanan fasilitas umum dan ekonomi di Kota Surakarta serta peran sub-sub pusat pertumbuhan yang ada belum terintegrasi satu dengan yang lainnya sehingga dapat menimbulkan ketimpangan. Menurut Petrakos (2005) ketimpangan atau disparitas wilayah regional cenderung terjadi pada daerah yang dinamis dan berkembang tumbuh lebih cepat. Sehingga seiring dengan dimulainya pertumbuhan ekonomi, ketidaksetaraan atau ketimpangan akan

meningkat, namun pada prosesnya akan semakin berkurang pada tahap pembangunan wilayah yang lebih maju dan lebih baik (Wheaton, 1981).

Disparitas antar daerah sering menjadi masalah serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan lambat. Daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama dikarenakan kekurangan sumber daya. Ada kecenderungan pemilik modal (investor) lebih memilih daerah perkotaan atau daerah yang manamemiliki fasilitas infrastruktur seperti transportasi, jaringan listrik, telekomunikasi jaringan, perbankan, asuransi, dan pekerja terampil (Barika, 2012).

Menurut Abipraja (2002), wilayah Pulau Jawa memiliki disparitas yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lain sangat mungkin terjadi efisiensi yang cukup baik, karena investasi masih terkonsentrasi di Jawa, terjadi aglomerasi melalui lokalisasi maupun urbanisasi di Jawa, dan tersedianya tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan cukup baik. Disparitas antara daerah di tersebut didekati dengan disparitas pendapatan antar daerah (Indeks Williamson) yang mencerminkan disparitas pada tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah. Menurut Tambunan (2001) beberapa faktor utama penyebab terjadinya disparitas antar wilayah sebagai berikut :

- a. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
- b. Alokasi investasi
- c. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antarwilayah
- d. Perbedaan SDA antarwilayah
- e. Perbedaan demografis antar wilayah
- f. Kurang lancarnya perdagangan antarwilayah.

Dari kecenderungan kondisi di atas dapat terlihat bahwa yang diperlukan dalam perkembangan wilayah Greater Surakarta saat ini adalah pengembangan wilayah dan manajemen pertumbuhan (growth management) yang baik. Pengembangan wilayah (regional development) merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan permasalahan wilayah bersangkutan (Ambardi & Prihawantoro (ed), 2002:47).

Petrakos (1989) menyebutkan bahwa manajemen pertumbuhan yaitu terkait dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pendorong utama dalam pengurangan disparitas regional sehingga diperlukan adanya penguatan kebijakan pembangunan. Selain itu, Thisse (2000) juga menjelaskan bahwa kebijakan dari aspek kelembagaan melalui sistem kelembagaan yang

memiliki basis wilayah (regional) dan bukan fungsional. Pembuat keputusan yang relevan harus dikonsolidasikan dan digabungkan ke dalam wilayah yang lebih besar sehingga mereka mampu mengakomodasi sebanyak mungkin dampak kebijakan publik lokal.

Dari keseluruhan gambaran permasalahan secara umum diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan dan pengembangan wilayah Perkotaan Surakarta masih terfragmentasi. Melihat kecenderungan tersebut, maka penting kiranya wilayah Perkotaan Surakarta ini mendapat perhatian khusus dimana perlu adanya strategi pengembangan Kota Surakarta yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahap antara lain tahap persiapan, pengumpulan data dan proses analisis. Tahapan pengumpulan data dilakukan melalui survey data baik secara primer maupun sekunder. Survey primer dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, melakukan wawancara, sedangkan untuk survey sekunder dilakukan melalui telaah kajian literatur dan survey instansi berupa telaah dokumen.

Penelitian menggunakan metode kuantitatif karena berbasis pada literatur dan memenuhi kaidah rasionalitas (Sugiyono, 2012). Kompilasi data yang dihasilkan akan dianalisis untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan dan fakta tertentu dengan kondisi empiris atau variabel secara komprehensif. Pendekatan kuantitatif digunakan analisis deskriptif, ketimpangan wilayah dan analisis tipologi daerah (sektor unggulan).

Teknik analisis data (tools) yang digunakan yaitu analisis ketimpangan wilayah dengan menggunakan Perhitungan Indeks Williamson dan perhitungan serta penetapan tipologi klassen. Analisis sektor unggulan dengan menggunakan perhitungan LQ dan Shiftshare yang selanjutnya dipetakan dengan menggunakan GIS.

III. PEMBAHASAN DAN HASIL

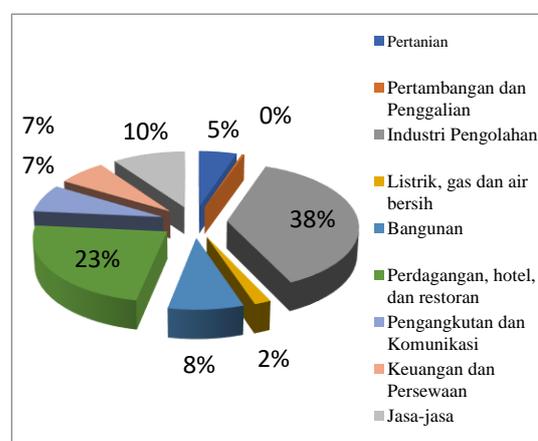
Ruang lingkup wilayah perkotaan Surakarta adalah Kota Surakarta dan wilayah disekitarnya yang mendapat pengaruh langsung dan kuat dari perkembangan Kota Surakarta dan menjadi perluasan wilayah perkotaan. Dari hasil deliniasi yang dilakukan maka terdeliniasi wilayah perencanaan Perkotaan Surakarta meliputi Kota Surakarta dengan 9 Kecamatan yang terkena pengaruh langsung yaitu Kecamatan Ngemplak (Kabupaten Boyolali), Kartasura, Gatak, Baki, Grogol dan Mojolaban (Kabupaten Sukoharjo) Kecamatan Colomadu, dan Gondangrejo (Kabupaten Karanganyar). Wilayah ini memiliki

luas 32.842,3 Ha dengan jumlah penduduk 1.227.645 jiwa.

Untuk melihat wilayah sekitarnya yang berpengaruh langsung dari perkembangan Kota Surakarta maka dilakukan kajian dengan memperhatikan area lahan terbangun, kepadatan penduduk, kajian RDTR Surakarta, kecenderungan atau tren konversi lahan, tren mata pencaharian penduduk, dan nilai PDRB dengan hasil sebagai berikut :

1. Struktur Ekonomi Perkotaan Surakarta

Dalam struktur ekonomi Perkotaan Surakarta tahun 2017 dapat dilihat bahwa proporsi sektor industri pengolahan dan perdagangan memberikan kontribusi yang tertinggi, sedangkan sektor pertambangan dan sektor listrik, gas, dan air bersih memberikan kontribusi terendah. Berikut adalah diagram struktur ekonomi Perkotaan Surakarta tahun 2014.



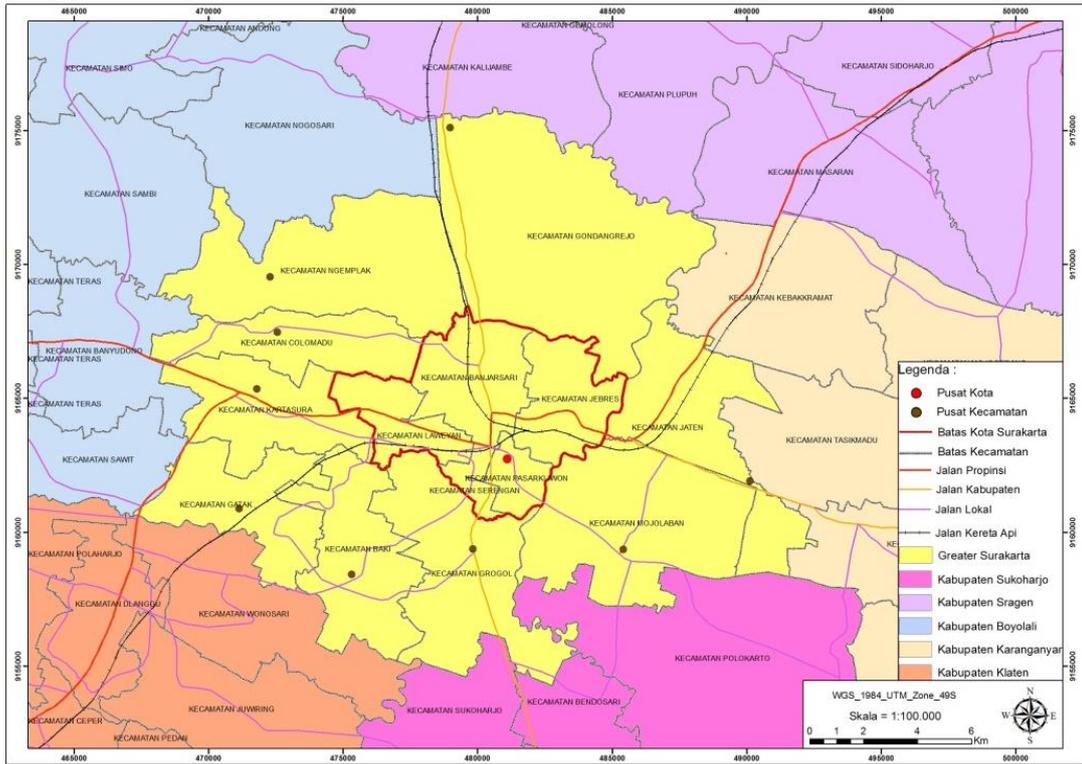
Gambar 2. Struktur Ekonomi Perkotaan Surakarta Tahun 2014

Sumber: Analisis, 2017

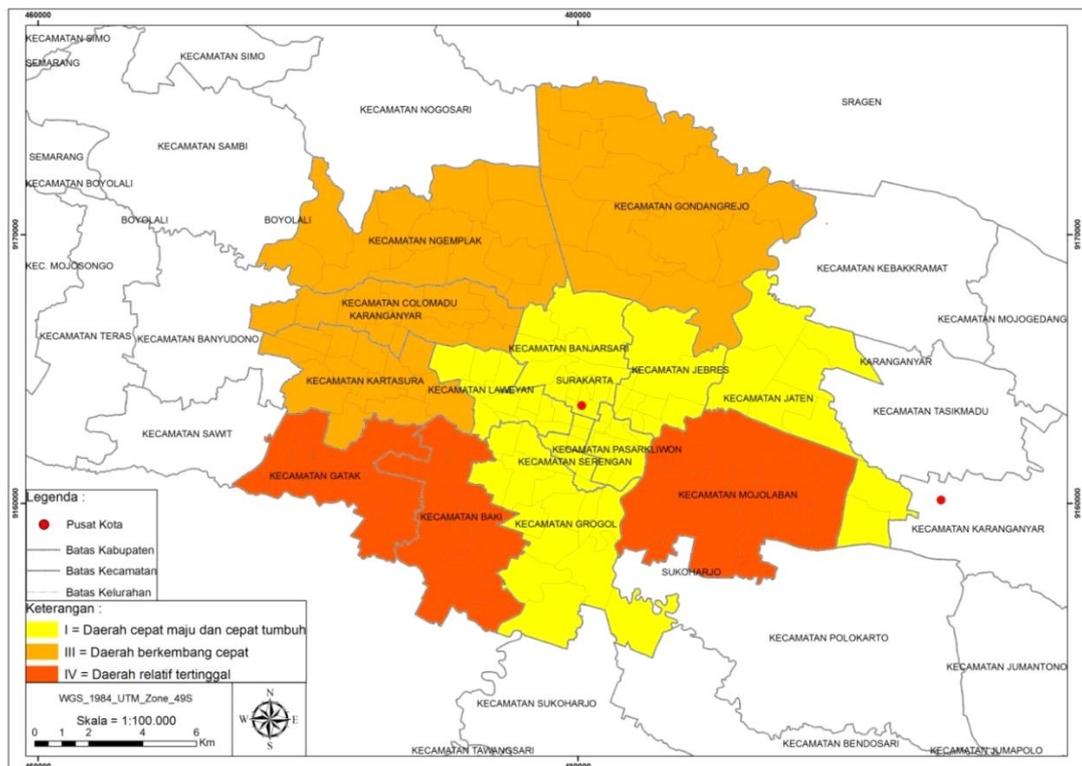
2. Sektor Unggulan

- Sektor Basis-Non Basis

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor basis-non basis dari suatu wilayah. Berdasarkan hasil perhitungan indeks location quotient PDRB Perkotaan Surakarta tahun 2012-2014, maka dapat teridentifikasi yang menjadi sektor basis perekonomian Perkotaan Surakarta.



Gambar 1. Wilayah Perkotaan Surakarta
Sumber: Analisis, 2017



Gambar 4. Peta Analisis Tipologi Klassen Perkotaan Surakarta
Sumber: Hasil Analisis, 2017

Tabel 3. Hasil Perhitungan LQ Rata-rata Wilayah Perkotaan Surakarta Tahun 2012-2014

Sektor Ekonomi	LQ Rata-rata (2013-2015)
Pertanian	0,35
Pertambangan & Penggalian	0,57
Industri Pengolahan	1,18
Listrik, Gas & Air Bersih	1,16
Bangunan	1,37
Perdagangan, Hotel & Restoran	1,00
Pengangkutan & Komunikasi	1,33
Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	1,11
Jasa-Jasa	0,93

Sumber: Analisis, 2017

Berdasarkan tabel diatas sektor ekonomi yang menjadi sektor basis yaitu sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas & air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan dimana enam sektor tersebut mempunyai nilai $LQ > 1$. Sementara itu, tiga sektor lainnya yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan & penggalian; dan sektor jasa – jasa merupakan sektor non- basis di Perkotaan Surakarta karena mempunyai nilai $LQ < 1$. Sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut telah menunjukkan aktivitas utama perkotaan yaitu sektor sekunder dan tersier.

3. Kinerja Perekonomian Wilayah

Analisis Shift-Share digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian wilayah dan mengidentifikasi sektor unggulan di wilayah Greater Surakarta, serta mengetahui perkembangan pertumbuhan suatu sektor (lambat/cepat). Data yang digunakan yaitu data PDRB atas dasar harga konstan Greater Surakarta serta wilayah SSBK di tahun awal periode (tahun 2012) dan di tahun akhir periode (tahun 2014). Berikut adalah hasil perhitungannya.

Tabel 4. Interpretasi Nilai KPP

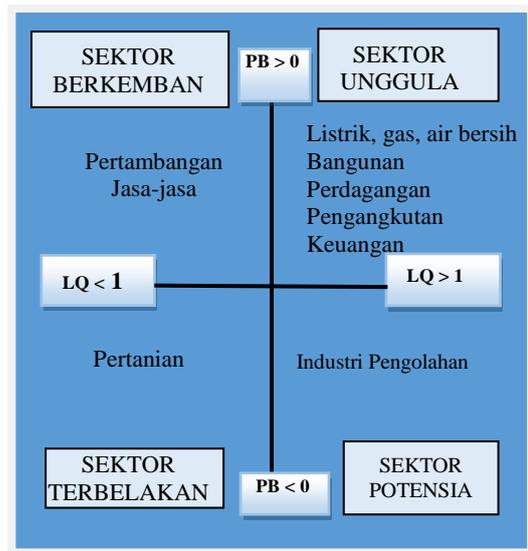
No	Lapangan Usaha	KPP	KPPW	KPP+ KPPW (PB)	Keterangan
1	Pertanian	-0.052	0.004	-0.05	mundur
2	Pertambangan dan Penggalian	0.008	0.117	0.13	progresif
3	Industri Pengolahan	-0.009	-0.03	-0.03	mundur
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.017	0.018	0.03	progresif
5	Bangunan	0.013	0.002	0.02	progresif
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.034	0.050	0.08	progresif
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.010	0.010	0.02	progresif
8	Keuangan, Persewaan,	0.025	0.015	0.04	progresif

Jasa Perusahaan	0.047	-0.025	0.02	progresif
9 Jasa-jasa				

Sumber: Analisis, 2017

Hasil perhitungan KPPW menunjukkan sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif/tidak memiliki keunggulan komparatif. Dari tabel interpretasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 sektor di wilayah Greater Surakarta yang tidak memiliki daya saing, yaitu sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Hanya saja sektor jasa-jasa perkembangannya progresif dan pertumbuhan secara nasional tumbuh cepat. Untuk sektor pertanian mengalami perkembangan yang mundur, dan tumbuh lambat berdasarkan nilai KPP, meskipun mempunyai daya saing berdasarkan nilai KPPW.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dan Shift-Share, maka dapat diketahui tipologi LQ-SS, mengidentifikasi sektor-sektor yang masuk dalam sektor unggulan, sektor potensial, sektor berkembang dan sektor terbelakang. Dari skema tipologi LQ-SS, terdapat 5 sektor unggulan di Perkotaan Surakarta yaitu sektor bangunan, listrik gas air bersih, perdagangan, pengangkutan, dan keuangan. Industri pengolahan termasuk dalam sektor potensial, karena meskipun pertumbuhannya lambat dan cenderung mundur tetapi merupakan sektor basis wilayah Perkotaan Surakarta. Sektor pertambangan dan jasa-jasa termasuk dalam sektor yang berkembang. Sektor pertanian termasuk dalam sektor terbelakang, namun demikian meskipun pertumbuhannya lambat dan cenderung mundur tetapi memiliki daya saing. Berikut adalah skema tipologinya:

**Gambar 3.** Skema Tipologi LQ-SS

Sumber: Hasil Analisis, 2017

4. Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Surakarta

Alat analisis Klassen Typology (Tipologi Klassen) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-

masing daerah, sehingga mengetahui posisi perekonomian daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (2010-2014) dan pertumbuhan PDRB untuk tiap kecamatan (2010-2014), beserta rata-ratanya untuk wilayah Perkotaan Surakarta dapat dilihat pada lampiran. Untuk hasil analisis kelas dapat dilihat pada peta berikut ini.

Wilayah Perkotaan Surakarta terbagi menjadi 3 kategori, yang pertama adalah daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh yaitu Kota Surakarta, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Jaten, yang kedua adalah daerah berkembang cepat yaitu kecamatan Gondangrejo, Colomadu, Ngemplak dan Kecamatan Kartasura, sedangkan daerah yang relatif tertinggal yaitu kecamatan Gatak, Baki dan Mojolaban. Kondisi dari kategori masing-masing kecamatan tersebut yaitu daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, daerah berkembang cepat dan daerah tertinggal dapat dijelaskan melalui potensi ekonomi yang berkembang dan aktivitas ekonomi di masing-masing kecamatan yang menjadi satu kesatuan dalam lingkup wilayah Perkotaan Surakarta.

4. Aktivitas Perekonomian Perkotaan Surakarta

• Perkembangan Kegiatan Pertanian Wilayah Perkotaan Surakarta

Kegiatan sektor pertanian (termasuk pertanian padi, peternakan, perikanan) dalam memberikankontribusi terhadap nilai PDRB, mengalami peningkatan tiap tahunnya meskipun pertumbuhannya sangat kecil, jika dibandingkan dengan sektor lain. Dari hasil produksi, tiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. Lahan pertanian berkurang tiap tahunnya karena lahan pertanian yang rusak atau berkurang sebagai dampak dari aktivitas pembangunan fisik antara lain terjadi di beberapa desa di Kec. Ngemplak, seperti Desa Sawahan, Pandeyan, Ngesrep, Sindon dan Donoduhan.

Lahan pertanian yang rusak, dikutip dari www.solopos.com, sekitar 113 Ha akibat rusaknya saluran irigasi sawah selama pengerjaan jalan tol Solo-Mantingan sejak beberapa tahun lalu. Meskipun saluran irigasi telah diganti namun ternyata tidak berfungsi secara baik. Desa Sawan rusak sekitar 60 Ha, Pandeyan 30 Ha, Ngesrep 15 Ha, Sindon 5 Ha dan Donoduhan 3 Ha.

Pertanian di wilayah Perkotaan Surakarta cenderung mengalami penurunan dari tahun 2012-2014. Penurunan produksi pertanian tersebut dipengaruhi oleh luas lahan pertanian yang semakin menyusut karena alih fungsi lahan (industri, perumahan, perdagangan dan jasa) seperti yang terjadi di Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Sukoharjo, dan Kecamatan Gondangrejo. Lahan pertanian produktif di

kecamatan Colomadu, Jaten dan Gondangrejo terus menerus menjadi sasaran para investor/pengembang perumahan. Menurut Camat Colomadu, pengembangan perumahan terjadi merata di 11 desa di Colomadu.

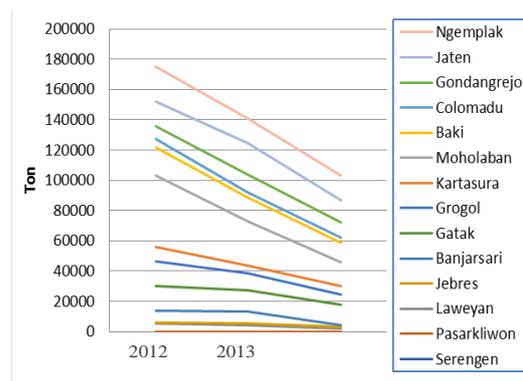


Gambar 5. Lahan Pertanian di salah satu desa di Kecamatan Baki

Sumber: Observasi lapangan, 2017

Dengan kondisi tersebut, maka penurunan produktivitas pertanian yang terjadi di wilayah Perkotaan Surakarta didorong oleh penurunan dari jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani.

Kemunduran perkembangan pertanian dapat dilihat melalui hasil produksi pertanian yang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2012-2014 yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 6. Penurunan Produksi Pertanian

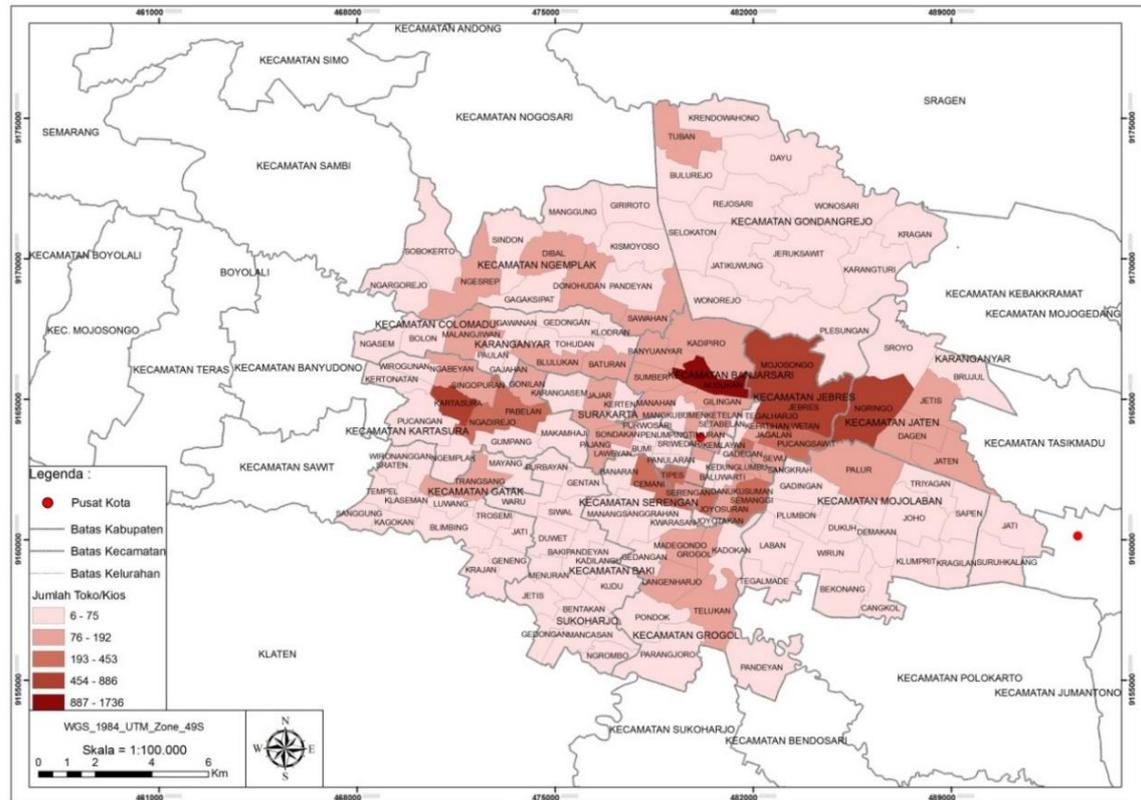
Sumber : Analisis, 2017

Kondisi tersebut dipengaruhi terjadinya konversi lahan dari pertanian menjadi lahan terbangun, yang diikuti dengan tumbuhnya kawasan industri. Salah satunya pabrik-pabrik besar mulai berekspansi ke Kecamatan Gondangrejo.



Gambar 7. Pembangunan perumahan baru di Sukoharjo dan Karanganyar

Sumber: Observasi lapangan, 2017



Gambar 8. Peta Fasilitas Perdagangan di Perkotaan Surakarta Tahun 2014

Sumber: Hasil Analisis, 2017

- *Kegiatan Perdagangan Perkotaan Surakarta*

Kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah Perkotaan Surakarta menunjukkan aktivitas perkotaan Perkotaan Surakarta. Kecenderungan perkembangan perdagangan seperti minimarket, toko/warung, restoran/kedai makanan terkonsentrasi di beberapa kecamatan dan terdapat 4 kecamatan dengan perkembangan aktivitas perdagangan yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sebaran fasilitas perdagangan paling banyak terpusat di Desa Ngringo, Desa Kartasura, Ngadirejo, Pabelan, kelurahan Semanggi, Mojosongo, kelurahan Jebres, kelurahan Nusukan. Hal tersebut menunjukkan adanya kondisi bahwa perkembangan aktivitas ekonomi yang masih belum seimbang dan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu.

Kecamatan dengan fasilitas perdagangan yang masih kurang yaitu Kecamatan Mojolaban termasuk dalam daerah yang relatif tertinggal.



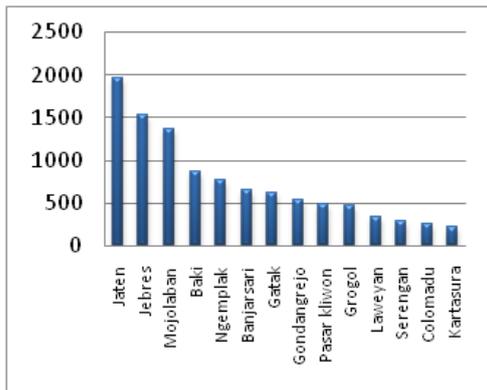
Gambar 9. Perdagangan di Perkotaan Surakarta

Sumber: Observasi Lapangan, 2017

- *Kegiatan Industri Besar dan UMKM*

Kegiatan industri besar di Perkotaan Surakarta terkonsentrasi di Kecamatan Jaten dan kawasan industri Palur. Industri kecil dan menengah dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Geater Surakarta. Peranan industri kecil dan menengah sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya. UMKM dikembangkan untuk memberdayakan potensi lokal dan memberikan usaha perekonomian yang berkelanjutan bagi masyarakatnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survey, jumlah UMKM terbanyak terdapat di Kecamatan Jaten, Kecamatan Jebres, Mojolaban, Baki, Ngeplak, Banjarsari, Gatak, Gondangrejo, Grogol, Pasar Kliwon, Serengan, Colomadu, Laweyan dan paling sedikit di kecamatan Kartasura. Berikut Grafik jumlah UMKM di Greater Surakarta.



Gambar 10. Grafik Jumlah UMKM di Perkotaan Surakarta Tahun 2014

Sumber: *Potensi Desa Tahun, 2014 dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2014, data diolah.*

Jenis UMKM yang dikembangkan bermacam-macam dan dapat dikelompokkan menjadi 8, antara lain industri batik, industri tekstil/konveksi (pakaian jadi, kain, dll), industri furniture (mebel, kursi, lemari, dll), industri logam (peralatan dapur, perabotan, dll), industri kerajinan (kerajinan tangan berupa hiasan dinding, anyaman dari bamboo dan rotan, tas, sangkar burung, blangkon, shuttlecock, dam sebagainya), industri olahan makanan dan minuman (tahu, tempe, dan sebagainya), industri bengkel dan industri lainnya.



Gambar 11. Sentra Batik Kauman

Sumber: *Observasi Lapangan, 2017*



Gambar 12. Sentra Batik Laweyan

Sumber: *Observasi Lapangan, 2017*

Di Kecamatan Baki, tepatnya di desa Mancasan terdapat sentra industri gitar. Seluruh proses produksi dari awal hingga finishing dilakukan oleh pelaku usaha rumah tangga di desa tersebut. Desa ini merupakan desa pertama kali munculnya pengembangan umkm gitar. Berikut beberapa gambar sentra industri gitar di Desa Mancasan.



Gambar 13. Sentra Industri Gitar di Desa Mancasan, Kec. Baki

Sumber: *Observasi Lapangan, 2017*

Produk hasil kerajinan yang lain seperti sangkar burung dan blangkon yang terdapat di Kelurahan Mojosongo, Kec. Jebres dan Kelurahan Serengan di Kec. Serengan. Dua kelurahan tersebut masing-masing merupakan daerah penghasil utama kerajinan tersebut. Berikut beberapa gambar produk sangkar burung dan blangkon dari usaha ekonomi lokal masyarakat di Kota Surakarta.



Gambar 14. Produk UMKM: blangkon dan sangkar burung

Sumber: *Observasi Lapangan, 2017*

Pengembangan UMKM di Greater Surakarta sudah terdapat di sebagian besar desa-desa. Hanya saja jumlah unit usaha UMKM dari masing-masing desa masih berada pada gap yang cukup tinggi, seperti yang terlihat dalam peta berikut. Perkembangan UMKM dominan di Desa Brujul, Suruhkalang, Sawahan, Kragan, Mojosongo dan Desa Demakan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survey, jumlah UMKM terbanyak terdapat di Kecamatan Jaten, Kecamatan Jebres, Mojolaban, Baki, Ngemplak, Banjarsari, Gatak, Gondangrejo, Grogol, Pasar Kliwon, Serengan, Colomadu, Laweyan dan paling sedikit di kecamatan Kartasura. Berikut grafik jumlah UMKM di Perkotaan Surakarta.

Jenis UMKM yang dikembangkan bermacam-macam dan dapat dikelompokkan menjadi 8, antara lain industri batik, industri tekstil/konveksi (pakaian jadi, kain), industri furniture (mebel, kursi, lemari), industri logam (peralatan dapur, perabotan), industri kerajinan (kerajinan tangan berupa hiasan dinding, anyaman dari bamboo dan rotan, tas, sangkar burung, blangkon, shuttlecock), industri olahan makanan dan minuman (tahu, tempe), industri bengkel dan industri lainnya. Pengembangan UMKM telah menjadi kebijakan dari Pemkot maupun Pemda di wilayah Perkotaan Surakarta.

Bantuan dari Pemerintah Kota/Pemerintah Daerah yang telah dilakukan yaitu berupa bantuan modal, pelatihan dan pembinaan/pendampingan. Bantuan dari Pemkot/pemda untuk pelaku usaha UMKM dan industri kecil yaitu berupa bantuan peralatan untuk peningkatan produksi, selain itu terdapat juga pelatihan-pelatihan manajemen dan teknis, untuk para pelaku usaha maupun calon pelaku usaha. Pelatihan teknis misalnya desain fashion, pemasaran, pembuatan cap batik/pembatikan, dan lainnya.

Dana APBD dari pemerintah pusat digunakan untuk pengembangan industri. Bantuan peralatan yang diberikan yaitu dalam bentuk hibah, jadi menjadi hak milik pelaku dan pemeliharaan terhadap peralatan tersebut. Setiap pengusaha baik itu usaha kecil, menengah, murni, sedangkan industri besar mendapat potongan harga. Selain itu Pemerintah Kota/Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan dalam pemasaran produk, seperti membantu distribusi produk melalui keikutsertaan dalam pameran-pameran baik yang diadakan oleh Pemerintah maupun oleh pihak swasta.

Pelatihan, bantuan alat, dan pameran tidak dipungut biaya. Pemasarannya lokal, regional dan internasional. Pelatihan dan pembinaan tersebut dilakukan mulai dari proses awal memulai usaha, manajemen, proses produksi, pengemasan, dan cara memperoleh izin IRT (izin industri rumah tangga) sampai kepada cara pemasaran. Selain itu dalam pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah juga dilakukan kerjasama antar daerah. Pelatihan dan pembinaan kerjasama antara Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Surakarta, misalnya pembinaan pupuk organik. Koordinasi dengan melakukan pertemuan sebulan sekali. Masalah yang terjadi dalam hal pembinaan, pendampingan, pelatihan yaitu ternyata tidak semua UMKM yang ada di Perkotaan Surakarta mendapat pendampingan maupun pelatihan. Hanya UMKM yang telah memiliki ijin usaha yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mendapatkan binaan, sehingga usaha skala mikro rumah tangga masih banyak yang belum dikembangkan secara maksimal.

Dalam usaha pengembangan UMKM terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemkot/Pemda. Kendala yang dihadapi yaitu terkait sikap mental dari masyarakat atau pelaku usaha. Misalnya diadakan pelatihan tetapi yang berpartisipasi hanya beberapa atau perwakilan saja. Dalam pembinaan lapangan seringkali masyarakat sulit ditemui, sehingga menjadi kendala untuk keperluan mapping atau pendataan. Tantangannya harus ada strategi khusus untuk menghadapi pelaku usaha. Selain itu terkait keberanian para pelaku usaha untuk melangkah maju. Seringkali para pelaku usaha kurang berani untuk mengambil langkah dalam mengembangkan wirausaha.

Dalam tiap pelatihan selalu dijelaskan dan diberi motivasi mengenai hal berikut, dari keenam sektor

berikut yaitu pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, industri dan perdagangan, usaha yang paling menjanjikan untuk cepat dikembangkan yaitu industri dan perdagangan. Karena keempat sektor lainnya tidak bisa lepas dari perantara/makelar yang seringkali ada "permainan" yang merugikan para petani/peternak, tidak berhadapan langsung dengan konsumen. UMKM dan perdagangan bisa bertemu langsung dengan konsumen dan mendapat keuntungan lebih besar.

Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah ada di sebagian besar desa-desa yang memiliki UMKM, namun masih cukup banyak juga yang belum difasilitasi KUR. Tidak adanya fasilitas Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Usaha Kecil di seluruh desa di Kecamatan Ngeplak. Terdapat fasilitas Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Usaha Kecil di seluruh desa di Kecamatan Jebres, Kecamatan Serengan, Gatak, Jaten dan Kecamatan Kartasura. Sedangkan desa-desa di kecamatan lainnya, keberadaan Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Usaha Kecil masih belum merata.

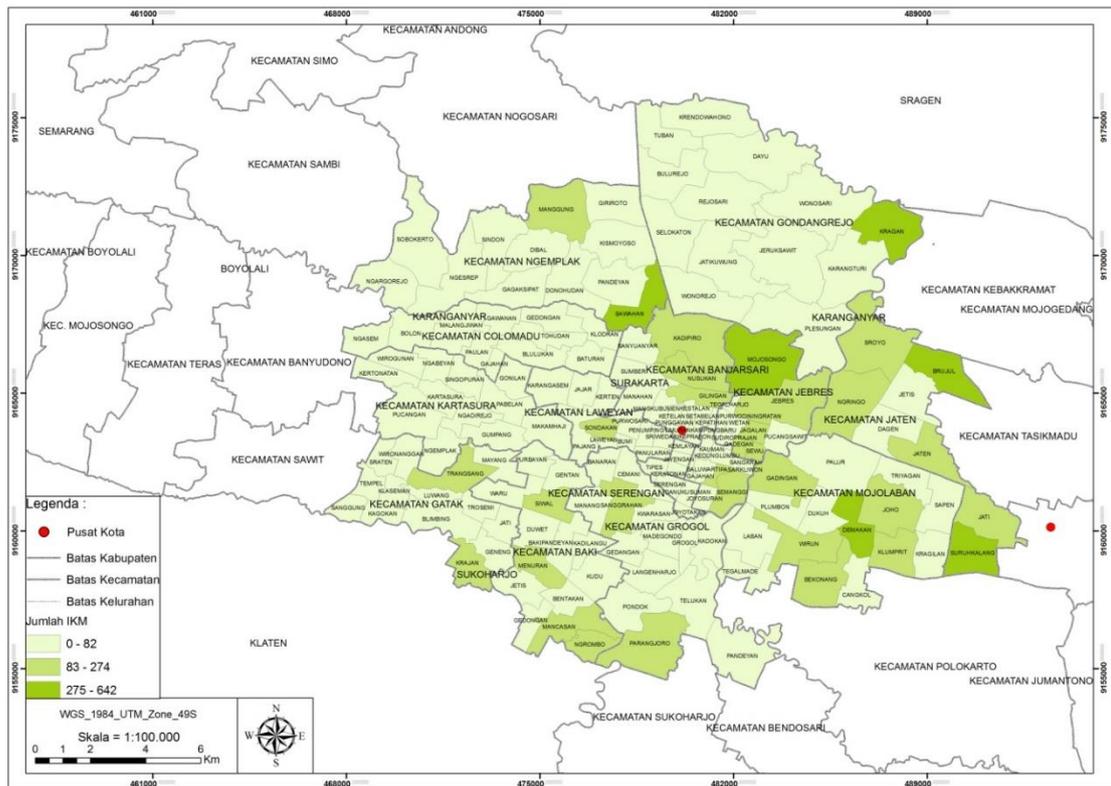
Kendala yang sering dihadapi oleh beberapa pelaku usaha dalam upaya pengembangan usahanya yaitu terkait modal usaha. Pelaku usaha sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Permintaan pasar yang besar terhadap produk kerajinan mereka, menuntut usaha mereka menghasilkan produk dalam jumlah yang besar pula dan hal itu memerlukan modal yang lebih banyak, sehingga mereka membutuhkan KUR untuk membantu usaha mereka dalam hal pembelian bahan baku dan membayar tenaga kerja. Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Usaha Kecil juga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pengembangan UMKM di seluruh desa yang ada di Kecamatan Baki, Gatak dan Mojolaban.

- *Sumber Penghasilan Penduduk*

Sumber penghasilan utama penduduk desa-desa di kecamatan Perkotaan Surakarta, menggambarkan sektor yang berkembang di desa tersebut. Penduduk desa-desa di Gondangrejo sebagian besar berpenghasilan dari sektor pertanian, karena dilihat dari penggunaan lahannya juga masih berupa lahan pertanian. Sumber penghasilan utama penduduk dari jasa dan perdagangan, sebagian besar di desa-desa Kecamatan Baki dan kelurahan di Kota Surakarta. Berikut adalah peta sumber penghasilan utama penduduk di Perkotaan Surakarta.

- *Tren Transisi Mata Pencaharian Penduduk*

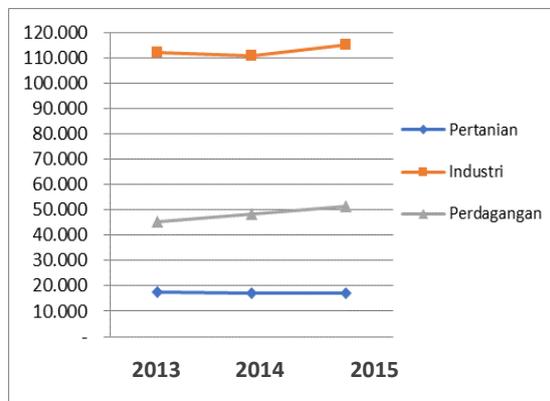
Adanya perkembangan kegiatan industri di wilayah Perkotaan Surakarta, baik industri besar maupun UMKM, ternyata berdampak pada perubahan mata pencaharian penduduknya. Terjadi transisi mata pencaharian. Transisi mata pencaharian penduduk terlihat dari sektor pertanian, menjadi bekerja di sektor industri dan perdagangan.



Gambar 15. Peta Jumlah UMKM Per Desa Perkotaan Surakarta
 Sumber: Hasil Analisis, 2017

Hal tersebut dapat dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian semakin menurun tiap tahunnya (rentang waktu 2009-2011), sedangkan di waktu yang bersamaan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri dan perdagangan.

Dapat dilihat bahwa kegiatan industri dan perdagangan cukup berperan dalam penyerapan tenaga kerja, namun masih belum maksimal. Dengan menurunnya jumlah penduduk yang bekerja di pertanian memberikan dampak pada turunnya hasil produksi pertanian, yang didukung dengan kondisi semakin banyak terjadi konversi lahan pertanian untuk kegiatan industri dan perumahan.



Gambar 16. Grafik Mata Pencarian Penduduk 2012-2014 Perkotaan Surakarta
 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2014, data diolah.

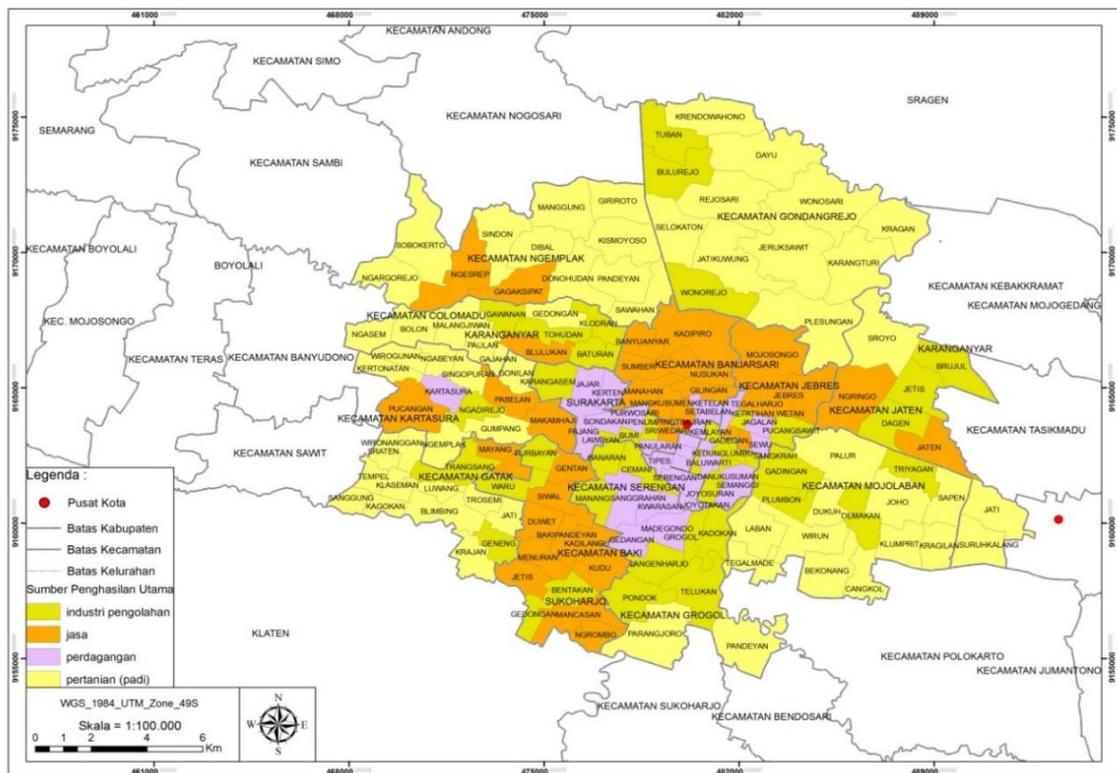
• *Ketimpangan Wilayah Perkotaan Surakarta*

Dalam mengukur ketimpangan regional digunakan metode Index Williamson (IW) dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga konstan sebagai data dasar. Nilai IW yang semakin kecil/ mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau makin merata, sebaliknya bila angka semakin mendekati satu berarti terjadi ketimpangan yang semakin besar.

Perkembangan angka ketimpangan di Perkotaan Surakarta dari tahun 2013-2015 berdasarkan hasil IW menunjukkan bahwa rata-rata nilai ketimpangan ekonomi wilayah Perkotaan Surakarta mengalami peningkatan dan memiliki kesenjangan yang tinggi yaitu IW sebesar 0,63 ($IW > 0,5$).

Terjadinya kesenjangan antar wilayah di Perkotaan Surakarta dipengaruhi oleh proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan.

Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya konsentrasi aktivitas ekonomis secara parsial dan memunculkan kondisi ketimpangan antar daerah. Selain itu juga, ada kecenderungan pemilik modal (investor) lebih memilih daerah perkotaan atau daerah yang mana memiliki fasilitas infrastruktur yang lebih baik.

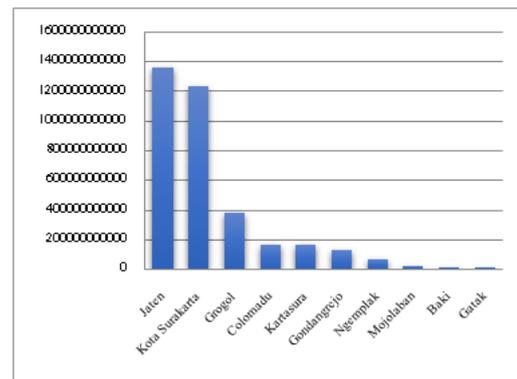


Gambar 17. Peta Sumber Penghasilan Utama Penduduk
Sumber: Potensi Desa, 2014

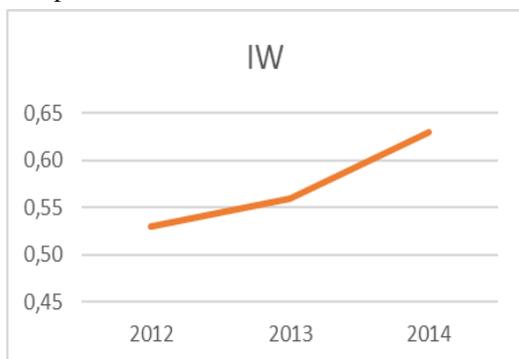
Berikut ini nilai IW di wilayah Perkotaan Surakarta tahun 2012-2014:

• *Investasi Ekonomi*

Pengembangan industri besar maupun UMKM di wilayah Perkotaan Surakarta, didukung adanya investasi. Nilai investasi di masing-masing kecamatan Perkotaan Surakarta dapat dikatakan tidak seimbang. Investasi tertinggi yaitu di Kecamatan Jaten dan Kota Surakarta, kemudian kecamatan Grogol dan Colomadu. Tingginya gap nilai investasi di wilayah Perkotaan Surakarta, menjadi salah satu penyebab pertumbuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi hanya terjadi di pusat-pusat tertentu.



Gambar 19. Grafik Nilai Investasi Ekonomi di
 Perkotaan Surakarta 2014
Sumber: Analisis, 2017



Gambar 18. Nilai IW Wilayah Perkotaan
 Surakarta
Sumber: Analisis, 2017

IV. SIMPULAN

Berdasarkan struktur ekonomi wilayah perkotaan Surakarta, sektor yang berkontribusi terbesar adalah dari sektor industri pengolahan dan perdagangan memberikan kontribusi yang tertinggi. Kondisi tersebut bersesuaian dengan sektor ekonomi yang menjadi sektor basis yaitu sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas & air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan. Sedangkan sektor pertanian; sektor pertambangan & penggalian; dan sektor jasa – jasa merupakan sektor non- basis. Sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut telah menunjukkan aktivitas utama perkotaan yaitu

sektor sekunder dan tersier. Selain itu, sumber penghasilan utama penduduk didominasi dari sektor jasa dan perdagangan.

Dari pola dan struktur pertumbuhan ekonomi perkotaan Surakarta terbagi menjadi 3 kategori, yaitu daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (Kota Surakarta, Kecamatan Grogol dan Jaten), daerah berkembang cepat (kecamatan Gondangrejo, Colomadu, Ngemplak dan Kartasura), dan daerah yang relatif tertinggal (kecamatan Gatak, Baki dan Mojolaban). Kondisi dari kategori masing-masing kecamatan tersebut dilihat melalui potensi ekonomi yang berkembang dan aktivitas ekonomi di masing-masing kecamatan yang menjadi satu kesatuan dalam lingkup wilayah Perkotaan Surakarta.

Persebaran industri besar dan UMKM di wilayah perkotaan Surakarta belum merata. Masih terpusat di pusat kota sehingga potensi lokal di masing-masing wilayah belum berkontribusi secara optimal. Kondisi tersebut juga ditandai dengan nilai investasi di masing-masing kecamatan Perkotaan Surakarta yang tidak seimbang sehingga perkembangan aktivitas ekonomi hanya terjadi di pusat-pusat tertentu.

Dalam kurun waktu 3 tahun, kecenderungan atau tren mata pencaharian penduduk menunjukkan bahwa pekerjaan di sektor pertanian semakin menurun sedangkan sektor industri dan perdagangan semakin meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh semakin berkembangnya sektor perdagangan dan industri sehingga menjadi faktor penarik masyarakat untuk bekerja di sektor tersebut. Selain itu, terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun juga berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk di sektor pertanian.

Ketimpangan ekonomi di Wilayah Perkotaan Surakarta termasuk dalam klasifikasi tinggi yaitu 0,63. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tidak meratanya perkembangan kegiatan ekonomi maupun fasilitas pendukung kegiatan ekonomi antara pusat dan sub-pusat di Perkotaan Surakarta.

Dengan demikian, diperlukan integrasi aktivitas ekonomi yang seimbang lebih menitikberatkan pada peningkatan keterkaitan dan distribusi aktivitas ekonomi agar lebih merata di wilayah perkotaan Surakarta. Integrasi aktivitas ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal dan lebih menitikberatkan pada pengembangan sektor industri dan pertanian.

Pengembangan sektor industri dan pertanian dilakukan di sub-sub pusat untuk mendukung terciptanya lapangan pekerjaan agar menjadi faktor penarik bagi penduduk untuk bekerja. Penguatan keterkaitan dan distribusi aktivitas ekonomi perlu dilakukan untuk mendorong interaksi aliran komoditas, bahan baku dan pemasaran antar wilayah di Perkotaan Surakarta. Sehingga keterkaitan antara industri besar (industri besar)

dan hilir (industri kecil) di Perkotaan Surakarta dan belum seimbangnya. Selain itu, diperlukan kerjasama pemerintah antardaerah dan juga tentunya penguatan kerjasama antarpelaku usaha. Penguatan tersebut yaitu dalam implementasi mekanisme kerjasama sesuai dengan kebijakan dan landasan hukum kerjasama antar daerah dalam aspek ekonomi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abipraja, soedjono, 2002. Perencanaan Pembangunan Di Indonesia, Edisi pertama, Airlangga University Press, Surabaya.
- Ambardi, Urbanus M dan Prihawantoro, Socia (penyunting). 2002. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah – Kajian Konsep dan Pengembangan. Jakarta: BPPT Press.
- Barika. 2012. Analisis Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009. Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan Volume 04 No 03 Januari-Juni 2012.
- BPS. 2010. Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2006-2010. Kantor Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Classis Works, and Recent Developments. Journal of Planning Literature.
- Dawkins, CJ. 2003. Regional Development Theory – Conceptual Foundations.
- Ertur, C, Le Gallo, J, 2003, “An exploratory spatial data analysis of European regional disparities, 1980–1995”, in European Regional Growth Ed. Fingleton, B (Springer, Berlin).
- Petrakos, G, Brada, J, 1989, “Metropolitan concentration in developing countries” *Kyklos* 42 556–578
- Petrakos, Pose and Rovolis. 2005. Growth, Integration, and Regional Disparities in the European Union. *International Journal Environment and Planning, Vol. 37, 2005.*
- Thisse, J F, 2000, “Agglomeration and regional imbalance: Why and is it bad?” *EIB Papers* 5(2). Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tatralog Kota Surakarta. 2009. Dishub Kota Surakarta.
- Todaro, Michael P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Wheaton, W, Shishido, H, 1981, “*Urban concentration, agglomeration economies and the level of economic development*” *Economic Development and Cultural Change* 30 17–30
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung : Alfabeta.
- _____, RTRW Kabupaten Boyolali. 2010. RTRW Kabupaten Boyolali 2011-2031.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali.

- _____, RTRW Kabupaten Karanganyar.2010. RTRW Kabupaten Karanganyar 2011-2031. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar.
- _____, RTRW Kabupaten Sukoharjo. 2010. RTRW Kabupaten Sukoharjo 2011-2031. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- _____, RUTRK Kota Surakarta. 2007. RUTRK Kota Surakarta 2007-2016. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
- _____,Potensi Desa (Podes) Jawa Tengah. 2011. Jawa Tengah.

